

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbarui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010: 2).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri, misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak (Agusti et. al, 2009: 2). Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya *tax ratio* (Riharjo, Budi Ikhsan, 2007: 288). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga

kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada awal tahun 1984 yaitu dengan merubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan membayar/ menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh (Agusti et. al, 2009: 2) .

Selain itu, tanggal 30 September kemarin Dirjen Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan Sensus Pajak Nasional (SPN). SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas

basis pajak, artinya ekstensifikasi, dengan mendatangi wajib pajak (WP) di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Agus DW Martowardjo mengatakan, “Arah sensus pajak itu akan ada di tiga tempat utama, yaitu pusat komersial, kemudian bangunan-bangunan misalnya perkantoran atau pun apartemen atau pun usaha komersial atau pun daerah perumahan” (*www.okezone.com*).

Sejauh ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, WP orang pribadi yang melaporkan SPT baru 8,5 juta WP. Padahal jumlah orang yang bekerja secara aktif ada 110 juta orang. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,73 persen. Sementara, untuk WP badan usaha, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui SPT hanya 466 ribu. Padahal jumlah badan usaha aktif, tanpa usaha mikro, sekitar 12,9 juta WP (*www.kompas.com*). Salah satu pajak yang dipungut pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan dimana beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah sehingga banyak wajib pajak yang berusaha untuk membayar kewajiban pajak lebih kecil dari yang seharusnya dan belum diselenggarakannya pembukuan dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak (Gunadi, Ari, 2010: 3).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Muliari et. al, 2011: 2). Kasadaran dan kepatuhan

yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008: 3 dalam Muliari et. al, 2011: 2). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mustikasari, Elia, 2007: 3).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan yang berjudul “Penngaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Termotivasi dari penelitian terdahulu, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam KPP Pratama di Boyolali.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan oleh peneliti dalam latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah ada pengaruh tentang kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh tentang kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan terutama bagi Kantor Pelayanan Pajak Boyolali dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak dan lebih memahami dunia perpajakan di Indonesia.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti memahami pentingnya sanksi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi antara lain definisi pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, pengelompokan pajak, tarif pajak, tata cara pemungutan pajak, nomor pokok wajib pajak, surat pemberitahuan, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pelaporan wajib pajak, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dan metode analisis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.